

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum (Pemilu) menjadi momentum bagi setiap partai politik peserta Pemilu untuk memenangkan kontestasi tersebut, mengingat bahwa arena yang dilegalkan oleh konstitusi untuk partai politik berebut pengaruh di negeri ini ialah melalui pemilihan umum yang diadakan sekali dalam lima tahun, maka tak ayal partai politik melakukan berbagai cara dalam memenangkan ontestasi Pemilu tersebut. Penggunaan strategi kampanye yang tepat serta pelebagaan partai yang berjalan baik tentu akan berdampak besar untuk mendongkrak perolehan suara partai politik. Tidak dapat dipungkiri bahwa partai politik menjadi salah satu kekuatan politik yang memiliki peranan vital dalam dinamika perpolitikan di berbagai negara. Begitu juga halnya dengan di Indonesia, sejak dulu hingga kini partai politik telah berkontribusi banyak dalam perjalanan panjang perpolitikan tanah air.

Berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan.<sup>1</sup> Partai politik sendiri dapat diartikan sebagai sebuah organisasi untuk memperjuangkan nilai atau ideologi tertentu

---

<sup>1</sup> Miriam Budiardjo. 2010. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 403.

melalui penguasaan struktur kekuasaan dan kekuasaan itu diperoleh melalui keikutsertaannya di dalam pemilihan umum.<sup>2</sup> Lebih lanjut partai politik merupakan organisasi politik yang dijalankan atas dasar ideologi tertentu yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan kekuasaan politik. Partai politik erat hubungannya dengan aktivitas pemerintahan di suatu negara. Sistem demokrasi yang diterapkan oleh Indonesia, maka negara menjamin kebebasan bagi warga negaranya untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan.<sup>3</sup>

Dengan demikian maka partai politik tentunya menjadi salah satu sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam berbagai proses pengelolaan negara.<sup>4</sup> Terlepas dari apapun partai yang dipilih dalam menyumbangkan hak demokrasinya oleh warga negara yang pasti hak tersebut dijamin oleh negara. Target setiap partai peserta Pemilu tentunya ingin keluar sebagai partai pemenang Pemilu pada tahun tersebut. Semakin banyak suara yang didulang oleh partai politik dalam Pemilu maka semakin besar pula jumlah kursi yang didapatkan partai politik di parlemen yang nantinya tentu akan berdampak pada semakin memiliki pengaruh dan peranan penting dalam setiap kebijakan yang akan diterapkan untuk kepentingan bangsa dan negara.

---

<sup>2</sup> Sigit Pamungkas. 2011. *Partai Politik Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta: *Institute for Democracy and Welfarism*. Hlm. 5.

<sup>3</sup> Dhimas Yoga Pratama, "Pelebagaan Partai Nasional Demokrat: Studi Penguatan Elektoral di Kabupaten Nganjuk", *Jurnal Politik Muda*, Vol. 4. No. 1. Hlm. 109.

<sup>4</sup> Miriam Budiardjo. *Op.Cit.* Hlm. 397.

Partai politik peserta Pemilu mesti mencari berbagai cara dalam mendapatkan simpati rakyat dan tentunya dapat mendulang suara sebanyak-banyaknya pada Pemilu, dengan memperkuat basis suara yakni pemetaan kantong-kantong suara partai tersebut, selanjutnya yang tak kalah penting membangun eksistensi dan pola strategi kampanye yang sekiranya dapat meningkatkan elektabilitas partai politik, serta mendapat simpati dari masyarakat. Pada dasarnya strategi kampanye politik bertujuan dalam membentuk serangkaian makna politis yang terbentuk dalam pikiran para pemilih menjadi orientasi perilaku yang akan mengarahkan pemilih untuk memilih partai politik.<sup>5</sup> Penggunaan strategi kampanye yang tepat oleh partai politik tentu akan mempengaruhi tingkat keterpilihan partai pada Pemilu. Hal yang kiranya paling krusial terhadap tingkat keterpilihan partai politik pada pemilihan umum selanjutnya ialah setiap partai politik peserta Pemilu kiranya perlu membangun fondasi yang kokoh terhadap berbagai aspek baik internal maupun eksternal partai baik dari segi kesisteman partai, kader partai, kepengurusan dan simpatisan maupun pihak luar yang kiranya dapat menunjang keberhasilan partai.

Partai politik tentunya tidak hanya menjadi salah satu simbol kekuatan politik, namun jauh dari pada itu partai politik pun memiliki peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun salah satu bentuk pentingnya partai

---

<sup>5</sup> Heni Yuwita, *Penurunan Jumlah Suara Partai Keadilan Sejahtera Dalam Pemilihan Umum Legislatif DPRD Di Kota Bekasi Tahun 2014*, Skripsi, FISIP UIN Syarif Hidayatullah, 2018. Hlm. 23.

politik dapat dilihat melalui fungsi dari partai politik itu sendiri. Pertama, fungsi perwakilan, fungsi ini sering dipandang sebagai fungsi utama partai politik dalam kemampuannya merespon dan memfasilitasi pandangan kader maupun para konstituennya. Kedua, pembentukan dan rekrutmen elit, fungsi ini mengarah pada partai politik berperan dalam melahirkan para kandidat yang berkompeten guna menjadi pemimpin-pemimpin negaranya. Pada peran ini parpol membentuk calon kandidat dari kader terbaik yang faham dalam menerjemahkan ideologi partainya.

Ketiga, perumusan tujuan, pada fungsi ini partai politik melalui kadernya yang terpilih sebagai pimpinan di level lokal atau nasional merumuskan program pemerintahan baik di ranah eksekutif maupun legislatif serta peran partai politik disini tidak saja sebatas sekedar untuk menginisiasi kebijakan tertentu, melainkan juga merumuskan rangkaian opsi-opsi kebijakan yang dianggap vital dan populis untuk meraih simpati pemilih. Keempat, artikulasi dan agregasi kepentingan, pada fungsi ini, partai politik menyuarakan dan mengumpulkan beragam kepentingan yang ada di masyarakat, termasuk kelompok bisnis, pekerja, keagamaan, etnis atau kelompok-kelompok lainnya yang sifatnya dianggap bisa memajukan atau membela kepentingan mereka. Kelima, sosialisasi dan mobilisasi, pada fungsi ini setiap kegiatan debat, diskusi internal, maupun kampanye dalam pemilihan yang diadakan partai politik secara langsung dianggap berperan sebagai agen pendidikan dan sosialisasi politik.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Andrew Heywood. 2013. *Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 398-405.

Pada konteks pelebagaan partai politik, secara sederhana pelebagaan dapat dimaksudkan untuk memaksimalkan fungsi-fungsi partai politik dalam merespon dinamika yang terjadi di tingkat internal maupun eksternal. Kemampuan partai memecahkan masalah-masalah internal serta merespons berbagai tuntutan realitas dapat berdampak pada kemampuan membangun loyalitas serta memperluas basis dukungan dan kelangsungan partai.<sup>7</sup> Partai politik yang solid dan mapan dari segi internal dapat dilihat dari pelebagaan partai politik tersebut, sebagai bentuk keseriusan partai dalam membangun fondasi nilai partai dan tentunya sebagai upaya dalam memenangkan kontestasi Pemilu.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Samuel Huntington seperti dikutip oleh Sigit Pamungkas dalam bukunya partai politik bahwa stabilitas sistem politik yang sedang berkembang sangat tergantung atas kekokohan partai politik yang dimiliki, dimana kekokohan partai mencerminkan wawasan dukungan dan derajat pelebagaan.<sup>8</sup> Pelebagaan partai juga dapat mencitrakan proses partai tersebut berjalan, dimana ketika pelebagaan partai belum berjalan maksimal tentu akan berpengaruh terhadap suara yang diperoleh partai tersebut dalam Pemilu. Suatu partai politik haruslah ditopang oleh pelebagaan struktur maupun nilai yang kuat. Salah satu bentuk dan upaya mencapai pelebagaan yang kuat secara struktur dan nilai tersebut selain dengan adanya kepengurusan partai politik berjenjang sesuai

---

<sup>7</sup> Firdaus. 2015. *Constitutional Engineering: Desain Stabilitas Pemerintahan Demokrasi dan Sistem Kepartaian*. Bandung: Yarma Widya. Hlm. 36.

<sup>8</sup> Sigit Pamungkas. Hlm. 70.

dengan struktur pemerintahan negara, kemandirian dalam pengambilan keputusan menyangkut internal maupun eksternal, hingga juga ditunjukkan dengan adanya keberadaan organisasi sayap partai politik yang kuat dan mengakar di tengah-tengah masyarakat.<sup>9</sup>

Keberhasilan pelebagaan partai terletak pada kemampuan partai dalam mencapai dan mempertahankan stabilitas nilai di tengah peningkatan dan perluasan partisipasi politik. hal demikian tidak dapat dipisahkan dari jumlah perolehan suara dalam persaingan di arena pemilihan umum sebagai bentuk atas pelebagaan partai yang diperankan pada arena legislatif dan eksekutif pada periode sebelumnya.<sup>10</sup> Berangkat dari pentingnya pelebagaan partai maka dengan demikian partai politik dituntut untuk dapat memperkuat dan memaksimalkan struktur pelebagaan partainya masing-masing guna meraih suara dari para konstituen sebanyak mungkin di setiap daerah pada Pemilu baik untuk Pemilu di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Agar nantinya dapat memenangkan kontestasi pada Pemilu dan mendapatkan kursi di parlemen atas hasil Pemilu tersebut.

Pentingnya pelebagaan partai sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, suatu partai untuk dapat menopang secara solid dan kokoh jalannya demokrasi dan stabilitas politik, kiranya pelebagaan partai menjadi kebutuhan yang penting

---

<sup>9</sup> M Nurul Fajri. 2019. Penguatan Pelebagaan Partai Politik Melalui Penataan Pengaturan Organisasi Sayap Partai Politik. *Prosiding Simposium Hukum Tata Negara*. Hlm. 86.

<sup>10</sup> Firdaus. *Op.cit.*, Hlm. 146.

dan tak dapat dihindarkan. Pelembagaan partai yang kokoh akan menjadikan partai bekerja sesuai dengan koridor dan fungsi-fungsi partai sebagaimana mestinya.<sup>11</sup>

Pada saat ini partai politik memang dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang cukup kompleks seperti halnya pelembagaan partai politik yang kurang baik, karena partai politik tidak mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di masyarakat misalnya seperti, ambang batas parlemen yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), dimana partai harus mampu memperoleh suara minimal pada ambang batas parlemen yang ditetapkan oleh KPU agar dapat memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), tentu hal ini sangat memberatkan bagi suatu partai yang belum memiliki posisi yang kuat. Pelembagaan partai politik sangat menentukan dalam kemajuan dari partai itu sendiri. Pelembagaan partai politik juga mengatur tentang bagaimana partai tersebut menjalankan peran dan fungsinya sekaligus dalam menyelesaikan konflik baik eksternal maupun internal.<sup>12</sup>

Pelembagaan partai menurut S Huntington dapat diartikan sebagai proses dimana organisasi dan tata cara untuk memperoleh nilai-nilai yang baku dan stabil. Huntington menilai bahwasanya semakin sulit organisasi beradaptasi dan tidak memiliki nilai yang baku maka semakin rendah pula tingkat pelembagaan partai.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Sigit Pamungkas. Hlm. 63.

<sup>12</sup> Mardaya Dkk. 2019. Pelembagaan Partai Politik (Studi Kasus Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia) Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*. Vol. 4. No. 4. Hlm. 4.

<sup>13</sup> Samuel Huntington. 1973. *Political Order in Changing Societies*. New York: Yale University Press. Hlm. 12

Pelebagaan partai jika dilihat dari yang dikemukakan oleh Vicky Randal dan Lars Svasand, dapat diartikan sebagai proses pematapan dan pemapanan partai politik baik secara struktural dengan mempolakan perilaku maupun secara kultural yakni mempolakan sikap dan budaya. Setidaknya terdapat empat dimensi turunan dari pelembagaan partai menurut Randal dan Svasand, yakni kesisteman organisasi, otonomi pengambilan keputusan, nilai-nilai terserap, dan reifikasi.<sup>14</sup>

Matthias Basedau dan Alexander Stroh mengemukakan bahwa berdasarkan hasil penelitian terkait pelembagaan partai berbagai negara di Benua Afrika menunjukkan bahwa faktor pelembagaan menjadi salah satu penentu bagaimana perolehan suara yang terjadi pada saat Pemilu pada partai yang bersangkutan. Sebagaimana yang terjadi di kawasan Afrika sub sahara dimana masyarakat yang cenderung homogen berdampak pada tingginya tingkat keterkenalan dan mengakarnya partai di negara tersebut. Berbeda halnya dengan partai politik di Negara Afrika Selatan yang beragam atau heterogen, tentu mengakibatkan pelembagaan partai politik di Afrika Selatan yang tidak terlalu mengakar di masyarakat.

Perolehan kursi yang diraih oleh Partai Hanura di Kota Padang terbilang cukup baik, dimana Partai Hanura memperoleh 4 kursi di DPRD Kota Padang pada Pemilu 2009, dan pada Pemilu di tahun berikutnya yakni Pemilu 2014 Partai

---

<sup>14</sup> Vicky Randall dan Lars Svasand. 2002. *Party Institutionalization and the New Democracies*. Sage Publications. Vol. 8. No. 1. Hlm. 5-29.

Hanura berhasil menempatkan kadernya sebanyak 5 orang di DPRD Kota Padang. Dimana 5 orang anggota dewan terpilih dari Partai Hanura Tersebut berasal dari 5 dapil yang berbeda-beda, dengan kata lain Partai Hanura berhasil menempatkan wakilnya dari seluruh dapil yang ada di Kota Padang.

Melihat trend positif tersebut tentunya Pengurus Partai Hanura Kota Padang pun memasang target yang cukup optimis dan realistis untuk tercapai pada Pemilu 2019. Partai Hanura Padang ini menargetkan meraih kemenangan dengan meraup suara terbanyak dengan mendudukkan masing-masing dua kadernya di tiap-tiap daerah pemilihan (Dapil) pada Pemilu Legislatif 2019 mendatang. “Sesuai dengan mekanisme Partai Hanura sudah mendaftarkan kader di KPU. Kita ingin Hanura menjadi pilihan di hati masyarakat dengan target meraih suara terbanyak melalui kader potensial di masing-masing Dapil yang telah ditentukan. Hanura optimis target itu bakal tercapai sepanjang seluruh kader potensial bisa menyampaikan visi misi Hanura kepada masyarakat,” kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hanura Padang Elvi Amri usai mendaftarkan Bacaleg.<sup>15</sup>

Namun tren positif yang dicapai oleh Partai Hanura pada Pemilu 2009 dan 2014 berbanding terbalik dengan hasil Pemilu 2019, Partai Hanura Kota Padang mengalami penurunan yang cukup drastis pada Pemilu 2019 lalu, dimana Partai Hanura tidak mampu mengirimkan satu orang pun wakilnya untuk duduk di

---

<sup>15</sup>Arman. 2018. DPC Partai Hanura Padang Daftarkan Bacaleg ke KPU <http://www.portalberitaeditor.com/dpc-partai-hanura-padang-daftarkan-bacaleg-ke-kpu/>. (diakses pada tanggal 23 Februari 2021).

kursi DPRD Kota Padang. Hal tersebut tentu menimbulkan suatu tanda tanya besar bagi peneliti, karena penurunan kursi yang diperoleh oleh Partai Hanura di Kota Padang sangat drastis. Fenomena tersebut tentu dilatar belakangi atas berbagai faktor vital baik di internal maupun eksternal dari Partai Hanura. Penurunan jumlah kursi yang cukup signifikan diperoleh Partai Hanura di Kota Padang berdasarkan hasil keputusan rekapitulasi suara yang dilaksanakan secara *real count* oleh KPU Kota Padang yang mana menyatakan bahwa tidak ada satu pun calon anggota legislatif (caleg) yang diusung dari Partai Hanura mencapai target suara untuk dikonversikan menjadi kursi untuk DPRD Kota Padang Periode 2019-2024.

Penelitian tentang penurunan atau kegagalan partai politik memperoleh kursi di legislatif telah banyak dilakukan oleh para peneliti seperti N.R.P Puteri<sup>16</sup>, Muhammad Billy dan Cut Maya Aprita Sari<sup>17</sup>, Hatta Abdi Muhammad dkk<sup>18</sup>, Mardaya dkk<sup>19</sup>, dan Dhimas Yoga Pratama<sup>20</sup>. Kelima literatur di atas yang membahas terkait faktor penurunan suara partai politik pada Pemilu dapat kita ketahui bahwa pembahasannya terkait konflik internal, kurang maksimal penerapan

<sup>16</sup> Puteri. 2014. Penurunan Suara PKB Dalam Pemilu Legislatif 2009 di Kabupaten Jombang dan Upaya-Upaya Mengatasinya. *Jurnal Politik Muda*. Vol. 3. No. 3.

<sup>17</sup> Muhammad Brilly, Cut Maya Aprita Sari. Kegagalan Partai Golongan Karya Dalam Memperoleh Kursi Di Kabupaten Pidie Jaya Pada Pemilu Tahun 2014. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*. Vol. 4. No. 3.

<sup>18</sup> Hatta Abdi Muhammad Dkk. 2020. Kegagalan Partai Politik Baru di Provinsi Jambi Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 Dalam Perspektif Pelembagaan Politik. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*. Vol. 5. No. 2.

<sup>19</sup> Mardaya Dkk. 2019. Pelembagaan Partai Politik (Studi Kasus Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia) Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*. Vol. 4. No. 4.

<sup>20</sup> Dhimas Yoga Pratama, "Pelembagaan Partai Nasional Demokrat: Studi Penguatan Elektoral di Kabupaten Nganjuk", *Jurnal Politik Muda*, Vol. 4. No. 1.

strategi kampanye, rendahnya popularitas caleg di tengah masyarakat. Sayangnya dari beberapa penelitian di atas kiranya tidak menyentuh pada aspek kader dan tokoh partai melakukan tindakan berpindah partai, dimana hal ini sering terjadi pada partai-partai sebelum perhelatan Pemilu. Fenomena pindah partai menjelang perhelatan Pemilu memang sudah menjadi hal yang selalu ada dari dulu hingga kini, banyak faktor yang mendorong kader partai memutuskan untuk pindah dari partai tersebut.

Anggota partai politik memiliki berbagai alasan yang mendorong munculnya keinginan untuk berpindah partai. Biasanya adanya sasaran yang ingin dicapai oleh anggota partai politik seperti, kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri dengan lebih baik lagi, adanya keinginan untuk meningkatkan karir politik, adanya keinginan untuk mendapatkan rasa aman dan nyaman di partainya sehingga dapat meningkatkan potensi diri, dan adanya kebutuhan anggota partai politik akan manajemen pengorganisasian partai yang sehat, turut mendukung munculnya keinginan untuk berpindah partai.<sup>21</sup>

Ketika anggota partai politik merasa bahwa partai politiknya tidak dapat mewujudkan tujuan yang diinginkannya, maka akan muncul kekecewaan terhadap partai tersebut, sehingga akan mendukung niat anggota partai politik untuk mencari partai baru yang sekiranya dapat mewujudkan kemauannya. Partai politik yang tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan konflik internal maupun eksternal

---

<sup>21</sup> Lusya Astrika. 2013. Intensitas Perpindahan Keanggotaan Partai Politik: Sebuah Tinjauan Sikap dan Norma Subyektif Anggota Partai. *Jurnal Ilmu Politik*. Vol. 2. No. 2. Hlm. 7-8.

partainya, dan tidak sesegera mungkin memperbaharui manajemen kepartaian, serta tidak berupaya untuk ”memanusiakan” anggota partainya, memiliki peluang besar untuk ditinggalkan oleh anggotanya.<sup>22</sup>

Fenomena pindah partai yang terjadi biasanya disebabkan oleh banyak faktor, menurut peneliti LSI Denny JA dan Ardian Sopa, fenomena pindah partai ini sudah terjadi sejak lama, namun pada Pemilu 2019 ini lebih banyak ditemukan kasus pindah partai. Adapun penyebab kader memutuskan untuk pindah partai di antaranya, pertama, mempertimbangkan nomor urut yang bagus seperti nomor urut satu sehingga lebih mudah untuk mensosialisasikannya. Kedua ialah penempatan dapil yang strategis. Ketiga pertimbangan *Parliamentary Threshold* atau ambang batas parlemen. Namun ada alasan besar dibalik maraknya kader yang pindah partai, alasan itu ialah hubungan partai dengan kadernya. Perpindahan partai memperlihatkan bahwa ikatan partai dan kader tidak kuat.<sup>23</sup>

Penelitian ini bermaksud ingin mengisi kekosongan penjelasan mengenai fenomena adanya kader dan tokoh partai yang melakukan tindakan pindah partai. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya ketidakharmonisan hubungan kader dengan partai politik tersebut. Merujuk pada fenomena yang telah dipaparkan di atas kasus yang menarik untuk diangkat dalam konteks ini adalah kasus Partai Hanura Kota Padang pada Pemilu 2019. Fokus permasalahan yang mempengaruhi penurunan

---

<sup>22</sup> *Ibid.* Hlm. 7-8.

<sup>23</sup> Kompas.com. 2018. <https://nasional.kompas.com/read/2018/07/18/10572661/fenomena-kader-pindah-partai-jelang-pemilu-2019-ada-apa> ( diakses pada tanggal 7 Oktober 2021).

kursi Partai Hanura di Kota Padang pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 terlihat dari banyaknya kader Partai Hanura yang menjadi caleg pada Pemilu 2014 tidak lagi mencalonkan diri sebagai caleg Partai Hanura pada Pemilu 2019.

Pada penelitian ini untuk meneliti lebih jauh terkait faktor penurunan jumlah kursi Partai Hanura pada Pemilu Legislatif Kota Padang 2019 dari segi pelebagaan partai yang dikemukakan oleh Matthias Basedau dan Alexander Stroh. Ia mengemukakan bahwa pelebagaan partai adalah proses di mana individu partai politik yang berpartisipasi dalam Pemilu mengalami peningkatan stabilitas dan nilai organisasi.<sup>24</sup> Isu pelebagaan masih menjadi isu sentral ketika membahas studi kepartaian dan Pemilu. Selain karena posisi partai politik yang begitu vital dalam demokrasi, isu pelebagaan selalu relevan karena banyak studi yang memperlihatkan justru pelebagaan tidak berjalan di internal partai. Oleh karena itu, isu pelebagaan akan terus relevan selama kepercayaan pembenahan pada institusi demokrasi semacam partai politik akan berkorelasi dengan peningkatan kualitas demokrasi.<sup>25</sup>

Adapun perbedaan yang menjadikan kebaruan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu ialah caleg Partai Hanura untuk Kota Padang pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di dominasi oleh caleg baru yang diusung oleh Partai

---

<sup>24</sup> Alexander Stroh dan Matthias Basedau. 2008. *Measuring Party Institutionalization in Developing Countries: A New Research Instrument Applied to 28 African Political Parties*. Germany : GIGA German Institute of Global and Area Studies / Leibniz-Institut für Globale und Regionale Studien.

<sup>25</sup> Nanang Suryana Dkk. 2020. Pelebagaan Partai Politik: Studi Pada Partai Solidaritas Indonesia Kota Bandung Tahun 2019. *Jurnal Civic Hukum*. Vol. 5. No. 1. Hlm. 54.

Hanura dalam kontestasi Pemilu Legislatif . Terhitung dari 45 caleg yang diusung Partai Hanura Pada Pemilu Legislatif Kota Padang 2019 hanya 8 orang caleg yang berasal dari Pemilu Legislatif sebelumnya yakni Pemilu 2014. Perbedaan selanjutnya ialah terletak pada teori yang peneliti pakai, dimana peneliti mencoba untuk menggunakan teori pelebagaan partai dari Matthias Basedau dan Alexander Stroh. Selanjutnya yang menjadi kebaruan dari penelitian ini adalah dari segi fenomena atau permasalahan yang peneliti angkat pada penelitian ini, dimana adanya penurunan jumlah kursi yang sangat signifikan terjadi pada Partai Hanura di DPRD Kota Padang pada Pemilu 2019 dengan Pemilu sebelumnya. Dimana Partai Hanura yang pada Pemilu 2009 mendapatkan 4 kursi di DPRD Kota Padang dan 5 kursi pada Pemilu 2014, namun pada Pemilu 2019 Partai Hanura tidak mendapatkan satupun kursi di DPRD Kota Padang.

Atas pemaparan deskripsi di atas penulis mencoba untuk lebih dalam lagi meneliti terkait penurunan kursi Partai Hanura di DPRD pada Pemilu Legislatif khususnya di Kota Padang, maka dari itu penulis dalam penelitian ini mencoba untuk mengangkat judul penelitian tentang Analisis Faktor Penurunan Suara Partai Hanura pada Pemilu Legislatif 2019 di Kota Padang dalam Perspektif Pelebagaan Partai.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Sebagaimana yang telah disampaikan pada latar belakang penelitian di atas bahwasanya, di tingkatan nasional Partai Hanura pun kiranya mendapatkan hasil yang kurang memuaskan dari Pemilu 2019 silam. Berbeda halnya dengan hasil yang

diperoleh Partai Hanura pada dua Pemilu sebelumnya di tahun 2009 dan 2014 dimana Partai Hanura berhasil mencapai ambang batas parlemen dan menempatkan kadernya untuk duduk sebagai anggota dewan di DPR-RI. Namun, pada Pemilu 2019 Partai Hanura gagal melewati ambang batas parlemen untuk bisa menempatkan wakilnya di DPR-RI, yang mana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1. 1**  
**Perbandingan Perolehan Suara Tingkat Nasional Partai Hanura Pada Pemilu 2009-2019**

No.	Tahun	Jumlah Suara	Jumlah Kursi	Persentase
1.	2009	3.922.870	18	3,77%
2.	2014	6.579.498	16	5,26%
3.	2019	2.161.507	0	1,54%

Sumber: *Data Sekunder* kpu.go.id, diolah oleh peneliti tahun 2021

Partai Hanura pada Pemilu 2019 silam memang mendapatkan hasil yang kurang memuaskan, perolehan suara partai yang didirikan mantan Menteri Koordinasi Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menko Polhukam) Wiranto ini terjun bebas, dari 6.579.498 suara (5,26 persen) di 2014 menjadi 2.161.507 suara (1,54 persen) pada 2019. Setidaknya partai ini kehilangan 3,72 persen dukungan dari Pemilu sebelumnya atau 4.417.991 suara.<sup>26</sup> Apa yang terjadi di tingkat nasional pun tak jauh berbeda dengan hasil yang diperoleh Partai Hanura pada Pemilu Legislatif Kota Padang 2019.

**Tabel 1. 2**  
**Daftar Perolehan Suara dan Kursi Partai Hanura Kota Padang Pemilu Legislatif Tahun 2014 dan 2019**

Tahun	Akumulasi Suara	Kursi
-------	-----------------	-------

<sup>26</sup> Suara Partai Pemilu 2019: Nasdem Melonjak Tinggi Hanura Terjun Bebas. <https://nasional.kompas.com/>. Diakses pada tanggal 19 November pukul 21.30.

2014	30.156	5
2019	13.371	-

Sumber: *Data Sekunder KPU*, diolah oleh peneliti tahun 2021

Berangkat dari hasil Partai Hanura pada Pemilu Legislatif Kota Padang 2014 dan 2019 dipaparkan pada tabel di atas, mellihatkan bahwa adanya penurunan perolehan suara yang cukup signifikan pada Partai Hanura di Pemilu Legislatif Kota Padang 2019 silam. Dengan adanya penurunan suara pada Pemilu Legislatif Kota Padang Tahun 2019 yang lalu tentu berdampak pada perolehan kursi Partai Hanura di DPRD Kota Padang untuk periode 2019-2024. Partai Hanura tidak berhasil menempatkan seorang pun wakil nya di DPRD Kota Padang untuk periode 2019-2024. Pada Pemilu 2014 Partai Hanura berhasil mendapatkan suara sebesar 30.156 suara dengan memperoleh akumulasi kursi sebanyak 5 kursi di DPRD Kota Padang dan pada Pemilu 2019 Partai Hanura hanya mendapatkan suara sebesar 13.371 dan tidak meraih satupun kursi di DPRD Kota Padang. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Basedau dan Stroh pada point mengakar di masyarakat, dimana menurunnya suara Partai Hanura tersebut tidak terlepas pula dari belum terlalu dikenalnya atau mengakarnya keberadaan Partai Hanura di Tengah Masyarakat.

Penurunan suara yang diperoleh Partai Hanura pada Pemilu Legislatif Kota Padang Tahun 2019 silam tentunya dikarenakan banyak hal, salah satunya ialah terhitung dari 45 caleg yang diusung Partai Hanura Pada Pemilu Legislatif Kota Padang 2019 hanya 8 orang caleg yang berasal dari Pemilu Legislatif sebelumnya yakni Pemilu 2014. Dengan demikian tentunya caleg yang diusung

Partai Hanura merupakan figur baru untuk Pemilu Legislatif Kota Padang 2019, hal ini dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 1. 3**  
**Daftar Calon Tetap Partai Hanura Kota Padang Pemilu Legislatif Tahun 2014 dan Kembali Menjadi Caleg pada Pemilu Legislatif 2019**

No	Nama Calon	Dapil
1	<b>Elvi Amri, SE</b>	1
2	Afrizon Muslim, SE	2
3	Wahid	2
4	Tommy	2
5	Febrinal	3
6	<b>Rafli Boy</b>	4
7	Suhaidi Olon, SH	5
8	Yanti Zarni	5

Sumber: *Data Sekunder* KPU diolah oleh peneliti Tahun 2021

Berangkat dari daftar calon tetap dari Partai Hanura untuk Pemilu Legislatif Kota Padang pada tabel di atas menunjukkan bahwa hanya 8 dari 45 orang yang menjadi caleg Partai Hanura pada Pemilu Legislatif Kota Padang 2014 yang maju pada kontestasi Pemilu Legislatif Kota Padang Tahun 2019. Dimana 2 dari 5 orang anggota dewan terpilih pada Pemilu 2014 yang kembali maju pada Pemilu 2019, yakni Elvi Amri, SE dari Dapil 1 (Koto Tengah) dan Rafli Boy dari Dapil 4 (Padang Timur dan Padang Selatan). Dengan demikian maka caleg dari Partai Hanura untuk Pemilu Legislatif Kota Padang Tahun 2019 terbilang pendatang baru setidaknya di Partai Hanura. Hal tersebut tentu berdampak kepada perolehan suara Partai Hanura pada Pemilu Legislatif Kota Padang Tahun 2019.

Partai Hanura pada Pemilu Legislatif di Kota Padang 2019 silam tidak berhasil menempatkan satu orang pun wakilnya untuk duduk di DPRD Kota Padang, hal ini tentunya jelas berbanding terbalik dengan hasil yang diperoleh Partai Hanura pada Pemilu sebelumnya di tahun pertamanya menjadi kontestan Pemilu di tahun 2009 memperoleh sebanyak 4 kursi di DPRD Kota Padang dan mengalami peningkatan pada Pemilu 2014, dimana Partai Hanura berhasil menempatkan wakilnya di DPRD Kota Padang sebanyak 5 orang yang terbagi dari setiap dapil yang ada di Kota Padang.

**Tabel 1. 4**  
**Daftar Anggota DPRD Kota Padang 2009 - 2019**

Partai Politik	2009	2014	2019
PKB	0	1	0
Gerindra	2	6	11
PDI Perjuangan	1	3	3
Golkar	5	5	3
NasDem	-	4	1
Berkarya	-	-	2
PKS	6	5	9
PPP	3	4	3
PAN	5	6	7
<b>Hanura</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
Demokrat	17	5	6
PBB	2	1	0
PKPI	0	0	0

Sumber : *Data Sekunder* diolah oleh peneliti tahun 2021

Berdasarkan data pada tabel 1.3 menunjukkan bahwasanya adanya penurunan jumlah kursi yang cukup signifikan dialami oleh Partai Hanura. Pada Pemilu 2009 Partai Hanura berhasil mendapatkan 4 kursi di DPRD Kota Padang, dan ditahun berikutnya yakni pada Pemilu 2014 Partai Hanura berhasil menambah

perolehan kursi di DPRD Kota Padang yakni 1 kursi yang mana pada tahun 2014 Partai Hanura memperoleh 5 kursi di DPRD Kota Padang yang mana berasal dari 5 dapil yang berbeda, adapun 5 orang anggota dewan yang berasal dari Partai Hanura antara lain, Elfi Amri Dapil 1 (Koto Tengah), Zaharman Dapil 2 (Kuranji-Pauh), Yendril Dapil 3 (Lubuk Begalung-Lubuk Kilangan-Bungus Teluk Kabung), Rafli Dapil 4 (Padang Selatan-Padang Timur), dan Osman Ayub Dapil 5 (Nanggalo-Padang Utara-Padang Barat).<sup>27</sup>

Di kancah nasional pun demikian, kader Partai Hanura yang menjadi anggota DPR-RI periode 2014-2019 pun setidaknya ada empat orang yang meninggalkan Partai Hanura sebelum masa jabatannya sebagai anggota DPR-RI berakhir. Adapun empat orang anggota DPR-RI yang memutuskan keluar dari Partai Hanura ialah, Rufinus Hotmaulana Hutahuruk (Dapil Sumatera Utara 2), Frans Agung Mula Putra (Dapil Lampung 1), Arief Suditomo (Dapil Jawa Barat 1), dan Dadang Rusdiana (Dapil Jawa Barat 2). Keempat orang tersebut memutuskan keluar dari Partai Hanura dan bergabung ke Partai NasDem.<sup>28</sup>

Data-data di atas kemudian diperkuat dengan temuan dalam berita yang menyebutkan bahwa anggota dewan dari Partai Hanura di beberapa kabupaten kota di Sumatera Barat yang memutuskan untuk pindah partai. Setidaknya ada 10 orang kader Partai Hanura yang memutuskan untuk maju dari partai lain pada Pemilu 2019

<sup>27</sup> Inilah Daftar 45 Caleg Terpilih Untuk DPRD Padang Periode 2014-2019. <https://minangkabaunews.com/>. Diakses pada tanggal 23 Februari 2021 pukul 13:25.

<sup>28</sup> DPR Lantik Pengganti Empat Kader Hanura yang Pindah ke NasDem. <https://nasional.tempo.co/>. Diakses pada tanggal 19 November 2021 pukul 22.00.

mendatang dan menyatakan siap diganti melalui mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW). Hal ini dikarenakan adanya pertikaian yang terjadi di Partai Hanura antara kubu Oesman Sapta Odang (OSO) dengan kubu Daryatmo yang belum selesai.<sup>29</sup> Selain itu, dalam sumber lain juga dijelaskan bahwasanya ada pergantian Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Kota Padang dari Fefrizal kepada Elvi Amri dengan alasan adanya mosi tidak percaya 9 dari 11 Pengurus Anak Cabang (PAC) secara tertulis kepada ketua umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Hanura. Adapun isi dari mosi tidak percaya dari PAC kepada Fefrizal ialah dikarenakan tidak akomodatifnya selama menjabat sebagai Ketua DPC, serta buruknya pola komunikasi yang dibangun dengan Sekretaris DPC.<sup>30</sup>

Menurut asumsi peneliti tentang penurunan jumlah kursi yang diperoleh Partai Hanura pada Pemilu 2019 di Kota Padang jika dilihat dari aspek pelebagaan partai, Partai Hanura kiranya masih belum mampu memaksimalkan penanaman nilai-nilai pelebagaan partai sebagaimana yang diutarakan oleh Matthias Basedau dan Alexander Stroh. Indikasi berperan besarnya faktor pelebagaan terhadap penurunan jumlah suara yang diperoleh Partai Hanura pada Pemilu Legislatif Kota Padang Tahun 2019 di antaranya,

Pertama, kehadiran Partai Hanura belum mengakar di tengah masyarakat. Hal ini ditandai dengan penurunan jumlah suara yang diperoleh Partai

<sup>29</sup> Pindah Partai, 10 Anggota DPRD dari Partai Hanura Sumbar siap PAW. <https://sumbar.antaranews.com/>. Diakses pada tanggal 19 November 2021 pukul 22:32.

<sup>30</sup> Elvi Amri Gantikan Fefrizal Sebagai Ketua DPC Partai Hanura Kota Padang. <https://www.portalberitaeditor.com>. Diakses pada tanggal 19 November pukul 23:06.

Hanura Kota Padang secara signifikan pada Pemilu 2019 silam. Disini tentu ada jika melihat dari hasil yang diperoleh Partai Hanura yang mana adanya gap yang terlalu jauh yakni selisih 16.785 suara antara Pemilu 2014 dengan 2019 menandakan bahwa belum adanya basis suara yang matang dan mengakar di tengah masyarakat.

Kedua, banyaknya kader Partai Hanura Kota Padang yang tidak lagi mencalonkan maupun dicalonkan dari Partai Hanura untuk Pemilu Legislatif Kota Padang 2019. Dimana hanya 8 dari 45 orang yang merupakan caleg Partai Hanura 2014 yang terdaftar kembali menjadi caleg Partai Hanura pada Pemilu 2019. Ditambah lagi dengan adanya kader Partai Hanura yang duduk menjadi anggota dewan pada periode 2014-2019 yang memutuskan untuk pindah partai atau mencaleg dari partai lain pada Pemilu 2019. Hal ini menandakan bahwa dari segi kekuatan organisasi Partai Hanura masih terbilang lemah, karena kurangnya militansi dan loyalitas para kader partai untuk bersama-sama menjalankan roda organisasi dan membesarkan Partai Hanura.

Ketiga, adanya pemberhentian pengurus DPC Partai Hanura dalam hal ini ialah Ketua DPC Partai Hanura Kota Padang Fefrizal yang mana beliau diberhentikan sebagai Ketua DPC di tengah masa jabatannya. Alasan pemecatan ini dikarenakan adanya mosi tidak percaya dari 9 dari 11 PAC Partai Hanura Kota Padang terhadap Saudara Fefrizal. Fenomena pemberhentian ini mengarah pada aspek koherensi pelembagaan partai menurut basedau dan stroh, dimana adanya perselisihan dan konflik yang terjadi di internal kepengurusan DPC Partai Hanura Kota Padang.

Maka dari itu peneliti dalam penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana faktor pelebagaan partai mengakibatkan penurunan perolehan suara Partai Hanura pada Pemilu Legislatif Kota Padang 2019 dari aspek pelebagaan partai?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diutarakan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis faktor pelebagaan partai yang menyebabkan penurunan perolehan suara Partai Hanura pada Pemilu Legislatif Kota Padang Tahun 2019.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian dari penelitian ini, maka dapatkan manfaat penelitian sebagai berikut :

#### **1. Manfaat akademis**

Dengan adanya penelitian mengenai pengaruh pelebagaan partai terhadap penurunan suara dan jumlah kursi Partai Hanura Kota Padang pada Pemilu 2019 lalu diharapkan mampu memberikan penjelasan baru tentang faktor suara partai politik pada Pemilu serta diharapkan juga dapat memperdalam pemahaman dan menambah khazanah ilmu pengetahuan terkait dengan faktor faktor yang menyebabkan penurunan suara dan jumlah kursi yang diperoleh Partai Hanura pada Pemilu 2019 di Kota Padang.

## 2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ilmiah ini diharapkan bisa menjadi salah satu bahan evaluasi dan catatan kritis bagi keberlangsungan dan langkah strategis pelebagaan partai politik pada kontestasi Pemilu berikutnya.



